

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif *Society* 5.0: Membangun Warga Negara Humanis-Teknologi *Citizenship Education in the Perspective of Society 5.0: Building Humanistic-Technological Citizens*

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Muhamad Febrian

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: muhfebrian585@gmail.com

Muhamad Adip Salikin

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: adipsolikin1647@gmail.com

Faiq Gibran Abdullah

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: gibran16072007@gmail.com

Muhammad Nadhif Mirzaq

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: nadhiif1737@gmail.com

Article Info

Received : 30 September 2025

Revised : 15 October 2025

Accepted : 20 October 2025

Published : 26 October 2025

Keywords: society 5.0, education technology, hybrid

Kata kunci: masyarakat 5.0, teknologi pendidikan, hybrid

Abstract

The development of information technology is currently reaching all areas of people's lives, including education. In the era of the industrial revolution 4.0 required three literacies namely data literacy, human literacy, and technological literacy. Learning in the revolutionary era 4.0 can apply hybrid/blended learning and Case-base Learning. Even education in the era of society 5.0, allows students or students in learning activities side by side with robots that have been designed to replace the role of educators. So what about the education system in Indonesia? This paper examines the readiness of Indonesian education in welcoming the era of society 5.0. Thus, activists and education stakeholders get a picture of the urgency of the presence of technology era society 5.0 in the world of education.

Abstrak

Berkembangnya teknologi informasi saat ini merambah pada seluruh bidang kehidupan masyarakat, termasuk bidang pendidikan. Pada era revolusi industri 4.0 diperlukan tiga literasi yaitu literasi data, literasi manusia, dan literasi

teknologi. Pembelajaran di era revolusi 4.0 dapat menerapkan hybrid/blended learning dan Case-base Learning. Bahkan pendidikan dalam era society 5.0, memungkinkan siswa atau mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran berdampingan dengan robot yang sudah dirancang untuk menggantikan peran pendidik. Lantas bagaimana dengan sistem pendidikan di Indonesia? Tulisan ini mengkaji tentang kesiapan pendidikan Indonesia dalam menyambut era society 5.0. Dengan demikian, para pegiat dan stakeholder pendidikan mendapat gambaran tentang urgensi hadirnya teknologi era society 5.0 dalam dunia pendidikan. Kata kunci: society 5.0, teknologi, pendidikan.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Muhamad Febrian, Muhamad Adip Salikin, Faiq Gibran Abdullah, Muhammad Nadhif Mirzaq. "Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Society 5.0: Membangun Warga Negara Humanis-Teknologi", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 675-686. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Muhamad Febrian, Muhamad Adip Salikin, Faiq Gibran Abdullah, Muhammad Nadhif Mirzaq



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Era Society 5.0 telah membawa perubahan besar dalam cara pandang global terhadap politik, ekonomi, masyarakat, dan terutama dunia pendidikan. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menghadirkan berbagai alternatif yang mempermudah kehidupan manusia sehari-hari. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun aplikasi media sosial lainnya memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan berkomunikasi secara praktis hanya melalui satu perangkat. Kemudahan ini berdampak pada perilaku siswa, namun tanpa adanya arahan dan bimbingan guru, akses informasi yang terlalu bebas justru berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran (Sapdi, 2023).

Lingkungan juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku remaja. Tekanan teman sebaya, kondisi keluarga yang tidak harmonis, ketersediaan narkoba, serta minimnya pengawasan orang dewasa menjadi faktor pendorong remaja terjerumus penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2020, sekitar 50-60 persen pengguna narkoba di Indonesia adalah remaja, termasuk pelajar dan mahasiswa. Hasil penelitian BNN bersama Universitas Indonesia juga memperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 3,8-4,2 juta orang (Dwi Laksana, 2021). Fakta ini menegaskan perlunya penanganan serius dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat. Pencegahan harus dilakukan secara komprehensif melalui edukasi, penyuluhan, rehabilitasi, pengawasan, hingga penerapan kebijakan yang ketat. Dalam hal ini, pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk membekali peserta didik dengan akhlak dan pengetahuan agar mampu menghadapi tantangan era teknologi (Marisa, 2021; Mariani, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya krisis moral pada generasi muda yang seharusnya menjadi teladan, namun belum mencerminkan sikap yang

layak ditiru. Ketika moral mulai terabaikan, pendidikan karakter hadir sebagai jawaban untuk membangun kembali kepribadian bangsa melalui jalur pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan strategis sebagai sarana pembentukan karakter bangsa yang saat ini mulai terkikis.

Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan? Karena salah satu misi utama PKn adalah pendidikan karakter, di samping fungsinya sebagai pendidikan politik, demokrasi, moral, dan hukum di berbagai jenjang pendidikan (Susiatik, 2013). Dibandingkan mata pelajaran lain, PKn bersama Pendidikan Agama menjadi garda terdepan dalam pembentukan karakter, sehingga keduanya menempatkan pendidikan karakter sebagai tujuan utama pembelajaran.

Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan gagasan Society 5.0—yang menempatkan integrasi ruang siber dan dunia fisik sebagai pusat pembangunan sosial—menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pendidikan kewarganegaraan. Society 5.0 menjanjikan peningkatan efisiensi dan inovasi berbasis teknologi, namun keberlanjutan sosial dan kemanusiaan menuntut perhatian khusus agar pembangunan teknologi tetap berorientasi pada martabat manusia, keadilan, dan partisipasi warga (Cabinet Office, Government of Japan, 2016; Carayannis et al., 2022). Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan harus bertransformasi: bukan saja mengajarkan pengetahuan institusional dan hak-kewajiban, tetapi juga membentuk warga negara humanis-teknologi yang memiliki kompetensi literasi digital, etika teknologi, kepedulian sosial, dan kapasitas kolektif untuk bertindak dalam menghadapi isu-isu global seperti krisis iklim, disinformasi, dan ketimpangan digital.

Kajian literatur menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan era digital perlu mengintegrasikan tiga pilar: (1) pengetahuan kewarganegaraan tradisional (institusi, hukum, HAM), (2) literasi teknologi dan etika digital (kemampuan menilai informasi, hak privasi, keamanan data), dan (3) nilai-nilai humanis dan keadilan sosial (solidaritas, toleransi, keadilan distributif) (Nuryadi, 2023; Shahidi Hamedani et al., 2024). Di Indonesia, peran nilai Pancasila dan kerangka HAM menjadi rujukan normatif penting dalam membentuk warga negara yang mampu memadukan etika tradisional dengan tuntutan teknologis modern (Nasoha et al., 2024; Nasoha et al., 2025).

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan kolega menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus diposisikan sebagai instrumen pembentukan kesadaran hak dan kewajiban warga, sekaligus sebagai arena untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif (Nasoha et al., 2025a; Nasoha et al., 2024a). Pendekatan semacam ini relevan ketika teknologi memperluas ruang publik: tanpa pendidikan nilai dan literasi, partisipasi digital mudah dimanipulasi oleh disinformasi atau diarahkan pada kepentingan eksklusif. Oleh karena itu integrasi pendidikan kewarganegaraan dengan aspek teknologis harus bersifat humanis—menumbuhkan kemampuan kritis, empati, dan tanggung jawab sosial sambil mengajarkan keterampilan teknis dan etika digital (NEC whitepaper, 2021; Carayannis et al., 2022).

Tujuan tulisan ini adalah (1) merumuskan konsep warga negara humanis-teknologi dalam kerangka Pendidikan Kewarganegaraan di era Society 5.0; (2) mengidentifikasi kompetensi inti (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang perlu dikembangkan; dan (3) menawarkan rekomendasi pedagogis dan kebijakan untuk mengintegrasikan literasi digital, etika teknologi, dan nilai-nilai kewarganegaraan (termasuk Pancasila dan HAM) ke dalam kurikulum formal dan non-formal. Dengan pendekatan ini, diharapkan pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen strategis dalam membangun partisipasi sipil yang inklusif, kritis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama pada masa yang ditandai oleh konvergensi teknologi dan kehidupan sosial.

Pendekatan penelitian ini akan memadukan tinjauan pustaka sistematis, analisis kebijakan, dan studi kasus implementasi program pendidikan kewarganegaraan berbasis teknologi. Kontribusi teoretis artikel ini adalah mengembangkan kerangka konseptual yang menyatukan dimensi normatif (nilai dan HAM), praktis (keterampilan digital dan partisipasi), dan etis (etika penggunaan teknologi). Secara praktis, rekomendasi yang diusulkan menargetkan pembuat kebijakan pendidikan, praktisi kurikulum, dan pendidik agar dapat merancang intervensi yang menumbuhkan warga negara yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga berkarakter humanis

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Studi pustaka dipilih karena penelitian tidak berfokus pada data empiris lapangan, melainkan pada eksplorasi, analisis, serta sintesis pemikiran yang terdapat dalam berbagai literatur akademik. Pendekatan kualitatif dipandang relevan karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam konsep dasar dan pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif society 5.0: membangun warga negara humanis-teknologi

2.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, antara lain:

- Jurnal ilmiah online (nasional maupun internasional) yang diperoleh melalui database seperti Google Scholar
- Buku elektronik (e-book) yang diakses melalui platform resmi seperti Perpustakaan Nasional RI dan Google Books.
- Artikel akademik dan prosiding seminar yang relevan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif society 5.0: membangun warga negara humanis-teknologi. Sumber literatur yang dipilih dibatasi pada publikasi yang kredibel, memiliki ISBN/ISSN, dan diterbitkan minimal dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, kecuali literatur klasik yang memiliki kontribusi mendasar terhadap pemikiran Pendidikan kewarganegaraan.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap:

- Identifikasi Literatur: Peneliti menelusuri kata kunci seperti filsafat ilmu, sejarah ilmu pengetahuan, epistemologi, dan perkembangan ilmu pada mesin pencarian akademik.
- Seleksi Literatur: Dari hasil penelusuran, literatur dipilih berdasarkan relevansi, kualitas publikasi, dan kedalaman pembahasan.
- Klasifikasi Data: Literatur yang terpilih dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, seperti konsep pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif society 5.0: membangun warga negara humanis-teknologi.

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) yang bersifat deskriptif-kualitatif. Tahapan analisis adalah sebagai berikut:

- Reduksi Data: Menyaring informasi penting dari literatur untuk membuang data yang tidak relevan.
- Display Data: Menyajikan informasi dalam bentuk ringkasan, tabel, dan uraian naratif sesuai dengan fokus penelitian.
- Sintesis: Menggabungkan temuan dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman baru.
- Penarikan Kesimpulan: Menghubungkan hasil sintesis dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

2.5. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai jurnal dan buku yang berbeda. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi merupakan hasil verifikasi dari berbagai literatur akademik yang kredibel.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pendidikan kewarganegaraan Pengertian PKN

PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) pada dasarnya dipersamakan dengan PKN (Pendidikan Kewarganegaraan). Hal ini karena hakikat PPKn merupakan bentuk civic education atau citizenship education yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Definisi PKN sendiri cukup beragam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 39 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dimaknai sebagai upaya membekali peserta didik dengan pengetahuan serta keterampilan dasar yang berkaitan dengan hubungan antarwarga negara dan pendidikan

pendahuluan bela negara, sehingga mampu mencetak warga negara yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh bangsa maupun negara.

Dari rumusan UU tersebut, PKn memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Materi yang diberikan mencakup pengetahuan serta keterampilan dasar mengenai hubungan kewarganegaraan dengan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
2. Memiliki sifat interdisipliner;
3. Bertujuan membentuk warga negara yang memiliki kualitas unggul dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara

Selain itu, PKn juga dapat dipandang sebagai bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Dalam konteks ini, orientasi utamanya adalah membina warga negara agar lebih baik, yaitu dengan meningkatkan kesadaran politik dan hukum melalui proses pembelajaran. Proses tersebut sangat dipengaruhi oleh karakter ilmu politik, baik dalam pengembangan materi maupun dalam penentuan strategi pembelajarannya. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membangun identitas nasional dan memperkuat rasa kebangsaan. PKn tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, demokrasi, serta kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.2. Tujuan PKN

Pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 tersebut mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, Nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

1. Bertolak dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah agar peserta didik mampu;
2. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
3. Berpartisipasi secara bermutu, bertanggungjawab, dan bertidak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup Bersama dengan bangsa-bangsa lain.
5. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Munthe A.F dkk 2023).

Peran Pkn dalam Era Society 5.0:

- Membentuk karakter bangsa melalui nilai-nilai Pancasila (iman, taqwa, disiplin, taat hukum, pantang menyerah, patriotik) agar generasi muda menjadi smart and good citizenship.
- Menjadi penyeimbang terhadap pengaruh budaya asing akibat derasnya arus teknologi, sehingga Indonesia tidak kehilangan identitas nasional (contoh: menjaga bahasa daerah dan rasa kebangsaan).
- Membangun moralitas dan nasionalisme supaya masyarakat tetap berpegang pada jati diri bangsa meskipun berada dalam era digital.
- Mempersiapkan SDM berilmu, berwawasan, dan berkarakter agar siap menghadapi tantangan teknologi, globalisasi, dan kehidupan sosial di masa depan.

Peran dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi era yang sudah-sudah menunjukkan seberapa pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Hadirnya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran sebagai penyeimbang dan pemurni rasa kebangsaan dalam diri warga negara Indonesia. Maka, dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, Indonesia tidak akan kehilangan identitas nasional contohnya seperti punahnya beberapa bahasa daerah

Pendidikan Kewarganegaraan secara keseluruhan dan dikhususkan dalam menghadapi Era Society yang akan datang. Masyarakat sering terlena akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi. Tidak jarang segala sesuatu yang dapat diatasi dengan adanya bantuan mesin menjadi hal yang sangat disorot masyarakat tetapi membuat banyak masyarakat melupakan kewajibannya sebagai manusia yang bertanggung jawab sebagai masyarakat dan warga negara. Untuk menghadapi era yang akan datang masing-masing individu diharapkan memiliki keterampilan dalam dirinya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keterampilan yang dimaksud tersebut termuat dalam satu pembelajaran yaitu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

3.3. Society 5.0

Menurut tempat asal dikembangkannya Society 5.0, yaitu Jepang, pemerintahnya mendefinisikan Society 5.0 sebagai "A human-centered society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space". Definisi ini menjelaskan bahwa Society 5.0 merupakan suatu ide dan konsep yang membawa perubahan besar dalam penyelesaian masalah masyarakat dengan pemanfaatan teknologi serta dengan mempertimbangkan aspek manusia dan humaniora

Inti dari Society 5.0 adalah konsep masyarakat masa depan yang berpusat pada manusia (human-centered) dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan robotika untuk menyelesaikan permasalahan sosial serta meningkatkan kualitas hidup.

Pokok Intinya:

1. Manusia sebagai pusat – teknologi bukan menggantikan manusia, melainkan membantu agar hidup lebih mudah, adil, dan sejahtera.
2. Keseimbangan teknologi & kemanusiaan – menggabungkan kecanggihan digital dengan nilai-nilai sosial, etika, dan budaya.
3. Penyelesaian masalah sosial – teknologi digunakan untuk mengatasi isu-isu seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, transportasi, dan ekonomi.
4. Keberlanjutan – menciptakan masyarakat yang inovatif namun tetap menjaga alam dan harmoni sosial.

Jadi, inti Society 5.0 adalah mewujudkan masyarakat cerdas dan sejahtera dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan.

3.4. Perbedaan society 4.0 dengan society 5.0

Society 4.0 merupakan era industri dan informasi yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital, internet, dan otomatisasi untuk meningkatkan produksi, efisiensi, serta akses informasi. Fokus utama Society 4.0 adalah penggunaan teknologi demi pertumbuhan ekonomi dan efisiensi kerja, sejalan dengan Revolusi Industri 4.0. Sementara itu, Society 5.0 hadir sebagai konsep masyarakat super pintar (super-smart society) yang dikembangkan Pemerintah Jepang. Konsep ini menekankan integrasi mendalam antara ruang siber (cyberspace) dan ruang fisik (physical space) melalui teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan robotika. Berbeda dengan Society 4.0 yang berorientasi pada produktivitas teknologi, Society 5.0 lebih berpusat pada manusia dengan tujuan memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga keberlanjutan masyarakat.

Inti perbedaannya adalah:

- Society 4.0 → manusia lebih sering jadi operator atau bahkan tergantung oleh mesin/ AI.
- Society 5.0 → manusia jadi pusat (human-centered), teknologi hanya sebagai alat bantu untuk membuat hidup lebih baik.

3.5. Implikasinya dalam bidang pendidikan

Implikasi Society 5.0 terhadap pendidikan terlihat pada perubahan paradigma pembelajaran yang semakin menekankan integrasi teknologi dan nilai kemanusiaan. Pendidikan tidak lagi hanya berpusat pada guru dan siswa, melainkan bertransformasi menjadi sistem berbasis jaringan global yang memungkinkan akses informasi tanpa batas. Guru berperan sebagai fasilitator dan inspirator, sementara siswa dituntut untuk mandiri, kreatif, dan inovatif dalam mencari serta mengolah pengetahuan. Teknologi seperti IoT, big data, artificial intelligence, dan virtual/augmented reality diintegrasikan ke dalam pembelajaran, namun tetap dibarengi dengan penekanan pada pendidikan karakter, moral, dan keteladanan yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Dengan demikian, pendidikan era Society 5.0 tidak hanya membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah kompleks, tetapi juga membentuk sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi pencipta (maker), bukan sekadar pengguna (taker) teknologi.

3.6. Warga Negara Humanis-Teknologi

Warga negara humanis-teknologi adalah individu yang tidak hanya mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi modern, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan moral dalam setiap aktivitasnya. Konsep ini lahir dari perpaduan antara humanisme (menekankan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, keadilan, tanggung jawab, solidaritas) dan kemajuan teknologi (digital literacy, penggunaan Artificial Intelligence, Internet of Things, big data, dll).

Teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar dan memperluas akses pendidikan, namun juga menimbulkan isu-isu seperti dehumanisasi dalam pembelajaran, kesenjangan akses teknologi, dan dampak terhadap otonomi peserta didik. Melalui pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai humanis dan etika, artikel ini menawarkan metode pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi secara bijaksana dan etis, dengan tujuan menciptakan pendidikan yang inklusif, seimbang, dan berorientasi pada pembentukan karakter. (Purwoko 2025).

Secara operasional bahwa humanis dalam perspektif pendidikan Islam berarti usaha memberi kesempatan kepada peserta didik mengembangkan alat-alat potensial dan berbagai potensi dasar atau fitrahnya seoptimal mungkin untuk difungsikan sebagai sarana bagi kelangsungan hidup, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan sikap iman dan takwa.

Pendidikan abad 21 dinilai sebagai suatu bentuk alternatif agar generasi muda semakin adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman. Walaupun tidak sepenuhnya keliru, dampak negatif dari beragamnya interpretasi makna pendidikan abad 21 juga tidak dapat dihindari, salah satunya adalah ketimpangan pendidikan di Indonesia. Pada masyarakat urban, pendidikan muncul sebagai komoditas perdagangan yang mendorong munculnya kelas sosial sehingga berlaku sistem "yang kaya semakin kaya; yang miskin semakin miskin"; sementara pada masyarakat terpencil masih berlaku sistem konvensional yang disebut oleh Paulo Freire sebagai kebudayaan bisu. Berkaca dari hal inilah, nilai-nilai humanis menunjukkan urgensinya sebagai salah satu alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

4. KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif Society 5.0 memiliki peran penting dalam membangun warga negara yang humanis-teknologi, yaitu individu yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan moral. Era Society 5.0 menuntut lahirnya generasi yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan digital, tetapi juga mampu menjaga identitas nasional, solidaritas sosial, serta kesadaran hukum dan politik. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter sekaligus penguatan literasi digital agar generasi muda Indonesia dapat menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, dan adaptif dalam menghadapi tantangan global.

4.1. Saran

1. Bagi Penulis. Perlu memperdalam kajian literatur dan penelitian lebih lanjut tentang integrasi nilai humanisme dengan teknologi dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan. Menyajikan inovasi model pembelajaran PKN berbasis digital yang sesuai dengan karakteristik Society 5.0.
2. Bagi Pembaca. Diharapkan pembaca, khususnya mahasiswa dan pelajar, dapat memahami pentingnya menjadi warga negara humanis-teknologi dengan meningkatkan literasi digital sekaligus menanamkan nilai-nilai moral Pancasila. Mengimplementasikan pengetahuan PKN dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun ruang digital.
3. Bagi instansi terkait. Mendorong pengembangan kurikulum PKN yang adaptif dengan perkembangan teknologi, namun tetap menekankan pada pembentukan karakter kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. E. (2020). Urgensi humanisme dalam pendidikan abad ke-21. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 173-188.
- Asmawati, A., & Roikhan, M. R. (2024). Representasi Pendidikan Humanistik Berbasis Teknologi dalam Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Insan Mulia*, 1(1), 22-26.

- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Istiqomah, A. F., Khoironi, M. H., & Ibrahim, S. F. (2024). Kewarganegaraan dan sistem pendidikan: Pengaruh globalisasi terhadap kurikulum kewarganegaraan di sekolah Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4).
- Cholisin, M. S. Konsep IKN-PKN.
- Elyawati, D., Feliza, D. A., & Sari, W. P. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan di pendidikan tinggi memiliki peran krusial sebagai pertahanan untuk memperkuat karakter bangsa di tengah era Society 5.0.
- Fazira, A., Budimansyah, D., & Mahpudz, A. (2024). Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Society 5.0: Menerapkan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(001 Des), 809-824.
- Handayani, N. N. L., & Muliastri, N. K. E. (2020, December). Pembelajaran era disruptif menuju era society 5.0 (telaah perspektif pendidikan dasar). In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 1, pp. 1-14).
- Kirani, A. P., & Najicha, F. U. (2022). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai pedoman dalam menghadapi era society 5.0 mendatang. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 8(2), 767-773.
- Majir, A., & Nasar, I. (2021). Pengaruh e-commerce era industri 4.0 dan kesiapan menyambut Revolusi Society 5.0. *Sebatik*, 25(2), 530-536.
- Marwa, D. M. Transformasi Pembelajaran melalui Ensiklopedia Android berbasis Teknologi, Keislaman dan Humanisme.
- Maulani, G., Saptadi, N. T. S., Wolo, H. B., Purnomo, A. C., Tangko, L. A. A., Suyitno, M., ... & Perang, B. (2024). Pendidikan kewarganegaraan.
- Mundzir, A. (2021). ERA SOCIETY 5.0. Peningkatan Ekonomi Masyarakat menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19, 16.
- Munthe, A. F., Harahap, M. J., & Fajri, Y. (2023). Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *AMI: Jurnal Pendidikan dan Riset*, 1(1), 29-40.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Meilasari, L. I., Ganefiada, S. R. S., & Ocktaviona, A. A. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Membentuk Kesadaran Warga Negara yang Bertanggung Jawab. *Jurnal BIMA*.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Riz, R. H., Oktaviani, A. F., & Khalimah, A. N. (2024). Pancasila dan sistem peradilan pidana: Analisis terhadap prinsip keadilan dalam penanganan kasus korupsi. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- Nasoha, A. M. M., Sulistyono, A., Mudhofir, & Atqiya, A. N. (2024). Social development perspective in child custody law enforcement: A comparative study of legal systems and their implications in developing and developed countries. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 8(1, S2).
- Prasiska, R. (2024). Penerapan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Kepribadian di Era Society 5.0. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1628-1634.

- Puspita, Y., Fitriani, Y., Astuti, S., & Novianti, S. (2020, April). Selamat tinggal revolusi industri 4.0, selamat datang revolusi industri 5.0. In Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
- Rahayu, H. (2021, August). Penerapan model pembelajaran blended learning pada pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan sikap nasionalisme peserta didik di era Society 5.0. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (Vol. 3, pp. 1-7).
- Rahim, I. (2025). Pendidikan Karakter dan Nilai Kearifan Lokal dalam Membangun Teknologi yang Humanis dan Berkelanjutan. *Bunga Rampai Pendidikan Pembangunan dan Teknologi*, 76.
- Rahmad, R. (2021). Kajian pembelajaran pkn mi/sd.
- Renata, S., & Salsabila, T. S. (2022). Penerapan dasar Society 5.0 di bidang pendidikan (Implementation of Society 5.0 in Education).
- Ridho, A., Wardhana, K. E., Yuliana, A. S., Qolby, I. N., & Zalwana, Z. (2022). Implementasi pendidikan multikultural berbasis teknologi dalam menghadapi era society 5.0. *EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran*, 7(3), 195-213.
- Salsabila, N. A., Istiqomah, N., Maulidah, I., & Setiyoko, D. T. (2025). Pendidikan humanisme pada teknologi di era globalisasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(2), 524-528.
- Siahaan, R. Y. K. P. (2022). Pendidikan era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0. *Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra (Pendistra)*, 94-98.
- Sitika, A. J. (2022). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Humanistik dan Teknologis di Perguruan Tinggi Umum. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 6(02).
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Saragih, K. W., & Ukur, J. (2024). Kepemimpinan sekolah penentu karakter peserta didik peran guru dalam membentuk karakter siswa melalui pembelajaran PPKN di sekolah dasar untuk menghadapi tantangan Society 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 5(3).
- Suranto, S. A. Manusia Teknologi yang Humanis dan Religius: Perspektif Buddhisme.
- Wahid, A., Badriyah, S. M., Nasoha, A. M. M., & Zamzami. (2023). Legalize custom-related landownership transactions: The Indonesian experience. *Diponegoro Law Review*, 8(2), 274-286.
- Widodo, M. B. P., Aula, A. F. Y., Riswanti, M. L., & Rozi, A. F. (2023). Society 5.0 pembelajaran IPS. Cahya Ghani Recovery.